

**TATA KELOLA KOLABORASI PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE
(Studi Kasus Suku Akit Pesisir Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert
Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)**

**Oleh
Hadi Candra
I3503231023**



**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI PEDESAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Tata Kelola Kolaborasi Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Kasus : Suku Akit Pesisir Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)” adalah karya saya sendiri dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir penelitian ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dan karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2026



Hadi Candra
NIM.I3503231023

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



RINGKASAN

HADI CANDRA. "Tata Kelola Kolaborasi Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Kasus : Suku Akit Desa Pesisir Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)" Dibimbing oleh RINA MARDIANA dan NURMALA KATRINA PANDJAITAN.

Hutan mangrove memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat adat Suku Akit Pesisir di Desa Hutan Panjang, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis. Selain berfungsi sebagai penyangga ekosistem pesisir, hutan Mangrove juga menjadi sumber penghidupan masyarakat yang memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan ekonomi secara turun-temurun. Namun, upaya pelestarian mangrove tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja melainkan memerlukan keterlibatan berbagai aktor seperti kesatuan pengelolaan hutan, pemerintah desa dan masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola kolaboratif yang mampu mengakomodasi kepentingan lingkungan sekaligus keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Hutan Panjang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan studi literatur (arsip desa, dokumen pemerintah dan penelusuran data digital). Wawancara dilakukan terhadap 15 informan kunci yang dipilih secara *purposive* (kesatuan pengelolaan hutan, pemerintah desa dan masyarakat adat suku akit). Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi proses kolaborasi, peran aktor, dampak kebijakan, serta adaptasi masyarakat suku akit dalam pengelolaan hutan Mangrove.

Terdapat empat temuan utama dalam penelitian ini. Pertama, peran aktor dalam penerapan *collaborative governance* pengelolaan hutan mangrove di Desa Hutan Panjang melibatkan masyarakat adat Suku Akit, Pemerintah Desa, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), namun kolaborasi yang terjalin belum berjalan optimal karena masih terdapat ketimpangan peran dan kewenangan. KPH sebagai pemilik kekuasaan tertinggi memiliki pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan terhadap pengelolaan hutan mangrove, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator seluruh kegiatan yang telah dibuat oleh KPH, sedangkan masyarakat adat suku akit adalah aktor yang memiliki kepentingan paling tinggi terhadap ekonomi dan kelestarian mangrove. Namun, masyarakat adat suku akit justru pihak yang keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan sangat rendah. Dengan demikian, berbagai program yang telah dilaksanakan oleh KPH, dalam rehabilitasi hutan mangrove belum mampu mendorong partisipasi masyarakat adat suku akit. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya ketimpangan kepentingan antaraktor yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat adat suku akit terhadap pemerintah. Akibatnya, tujuan pelestarian hutan mangrove belum dapat diwujudkan secara optimal.

Kedua, proses dan tindakan kolaborasi yang dibangun melalui keterlibatan berprinsip (*principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*) dan kapasitas untuk bertindak bersama (*capacity for joint action*) menunjukkan bahwa ada interaksi antaraktor namun belum menghasilkan tata kelola kolaboratif yang efektif. Keterlibatan berprinsip (*principled engagement*) dilakukan melalui sosialisasi, dialog, dan negosiasi antara kesatuan pengelolaan hutan, pemerintah

desa, dan masyarakat adat suku akit telah menghasilkan kesepakatan pembatasan penebangan mangrove maksimal 50 batang dalam enam bulan. Namun, kesepakatan tersebut hanya disampaikan secara lisan dan belum di tindak lanjuti oleh KPH melalui penerbitan dokumen administrasi yang sah. Motivasi bersama (*shared motivation*) tidak terjadi disebabkan kepercayaan bersama (*mutual trust*) tidak ada kepastian tertulis terkait hak kelola dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat adat suku akit. Pemahaman bersama (*mutual understanding*) belum terbentuk karena masyarakat adat suku akit memandang hutan mangrove sebagai ruang hidup dan sumber mata pencaharian mereka, sedangkan KPH memandang sebagai kawasan hutan mangrove tersebut telah terjadi deforestasi dan harus di rehabilitasi. Legitimasi internal (*internal legitimitation*) tidak seimbang karena KPH memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat dibanding masyarakat adat suku akit. Prinsip komitmen (*commitment*) tidak terjadi karena arah komitmen para aktor berjalan secara sendiri-sendiri dan belum pada satu tujuan bersama. Kapasitas untuk bertindak bersama (*capacity for joint action*) masih terdapat kelemahan dalam prosedur kesepakatan institusi (*procedural and institutional arrangements*) dimana kesepakatan terjadi antara masyarakat adat suku akit dan KPH masih berupa kesepakatan lisan tidak ada pernyataan tertulis mengenai kesepakatan tersebut. Dalam aspek kepemimpinan (*leadership*), kapasitas para aktor tidak berhasil mencapai ke tahap kolaborasi karena kepentingan para aktor tidak sejalan. Pada sisi pengetahuan (*knowledge*) pihak KPH memberikan edukasi terkait cara tanam hutan mangrove kepada masyarakat adat suku akit tetapi masyarakat adat suku akit sudah memiliki pengetahuan lokal yang di peroleh dari nenek moyang mereka secara turun temurun terkait tata cara menanam dan merawat mangrove.

Ketiga ouput kolaborasi pengelolaan mangrove berupa kesepakatan memanen sebanyak 50 batang mangrove setiap 6 bulan. Keempat, dampak kebijakan dilihat dari aspek ekologis, sosial dan ekonomi. Kebijakan pembatasan penebangan dan program rehabilitasi mangrove yang telah membuat pengelolaan mangrove di Desa Hutan Panjang lebih terkontrol secara eklogis. Sementara itu dari sisi sosial dan ekonomi kebijakan pembatasan penebangan telah membuat interaksi sosial masyarakat adat suku akit yang selama ini terbentuk melalui relasi sosial ekonomi dengan panglong mulai memudar dan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat.

Kelima, adaptasi masyarakat adat suku akit terhadap perubahan sosial dan ekonomi serta kebijakan yaitu tetap mempertahankan kearifan lokal mereka melalui aturan adat dalam pemanfaatan mangrove, seperti pembatasan waktu penebangan dan kewajiban menanam kembali bibit mangrove. Sebagian masyarakat adat suku akit mulai menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah dengan mengikuti program rehabilitasi mangrove, dan sebagian masyarakat lainnya mencari alternatif mata pencaharian baru yaitu menjadi buruh panen padi dan penyadap karet.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan mangrove di Desa Hutan Panjang belum sepenuhnya mencerminkan kolaborasi yang setara antara pemerintah dan masyarakat adat suku akit. Masyarakat adat suku akit masih menghadapi berbagai tantangan akibat terbatasnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan serta berkurangnya akses terhadap sumber penghidupan yang selama ini masih bergantung pada hutan mangrove.

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, Hutan Mangrove, Suku Akit, Pemerintah.

SUMMARY

HADI CANDRA. ***“Collaborative Governance in Mangrove Forest Management (A Case Study of the Akit Indigenous Community in Hutan Panjang Village, Rupat District, Bengkalis Regency)”*** Supervised by RINA MARDIANA and NURMALA KATRINA PANDJAITAN.

Mangrove forests play a vital role in the livelihoods of the Akit Indigenous Community in Hutan Panjang Village, Rupat District, Bengkalis Regency. In addition to functioning as a buffer for coastal ecosystems, mangrove forests serve as a primary source of livelihood, supporting the community's economic activities across generations. However, mangrove conservation cannot be achieved by a single actor alone; it requires the involvement of multiple stakeholders, including the Forest Management Unit (FMU), the village government, and the indigenous community. Therefore, a collaborative governance approach is required to balance environmental conservation with the sustainability of indigenous livelihoods.

This study employed a qualitative approach using a case study method in Hutan Panjang Village. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, including village archives, government documents, and digital data sources. Fifteen key informants were selected purposively, consisting of representatives from the Forest Management Unit, the village government, and the Akit Indigenous Community. Data were analyzed to identify the collaborative process, stakeholder roles, policy impacts, and the adaptation strategies of the Akit Indigenous Community in mangrove forest management.

The study produced five main findings. First, stakeholder roles in the implementation of collaborative governance involve the Akit Indigenous Community, the village government, and the Forest Management Unit (FMU). However, the collaboration has not functioned optimally due to unequal roles and authority among stakeholders. The FMU, as the institution with the highest authority, has a dominant influence on mangrove management policies. The village government acts primarily as a facilitator of FMU programs, while the Akit Indigenous Community has the greatest interest in both the economic benefits and ecological sustainability of mangrove forests. Despite this, the indigenous community has limited involvement in decision-making processes. Consequently, mangrove rehabilitation programs implemented by the FMU have not effectively encouraged community participation. This condition has been influenced by conflicting stakeholder interests, which have reduced the indigenous community's trust in government institutions and limited the effectiveness of mangrove conservation efforts.

Second, the collaborative process, consisting of principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action, demonstrates interactions among stakeholders but has not yet resulted in effective collaborative governance. Principled engagement has been carried out through socialization, dialogue, and negotiation among the FMU, the village government, and the Akit Indigenous Community, resulting in a verbal agreement to limit mangrove harvesting to a maximum of 50 trees every six months. However, this agreement has not been formalized through an official administrative document issued by the

FMU. Shared motivation remains weak because there is no written assurance regarding community management rights or the sustainability of indigenous livelihoods. Mutual understanding has also not been achieved, as the indigenous community perceives mangrove forests as their living space and source of livelihood, whereas the FMU views the area primarily as a degraded forest requiring rehabilitation. Internal legitimacy remains unequal because the FMU possesses stronger legal authority than the indigenous community. Likewise, commitment among stakeholders has not been fully established because each actor continues to pursue different objectives. In terms of capacity for joint action, weaknesses persist in procedural and institutional arrangements, as agreements remain informal and undocumented. Leadership capacity has also been insufficient to achieve effective collaboration because stakeholder interests remain divergent. Regarding knowledge, the FMU provides technical guidance on mangrove planting, while the Akit Indigenous Community already possesses traditional ecological knowledge inherited across generations concerning mangrove cultivation and maintenance.

Third, the principal output of the collaborative action is a joint agreement allowing the harvesting of up to 50 mangrove trees every six months. Fourth, the policy has generated ecological, social, and economic impacts. Ecologically, harvesting restrictions and mangrove rehabilitation programs have contributed to more controlled mangrove management in Hutan Panjang Village. Socially and economically, however, the harvesting restrictions have weakened the socio-economic relationships previously established between the indigenous community and local charcoal producers (panglong), resulting in reduced household income.

Fifth, the Akit Indigenous Community has adapted to social, economic, and policy changes by maintaining their local wisdom through customary rules governing mangrove utilization, including restrictions on harvesting periods and the obligation to replant mangrove seedlings after harvesting. Some community members have adapted by participating in government-led mangrove rehabilitation programs, while others have sought alternative livelihoods as rice harvest laborers and rubber tappers.

The findings indicate that mangrove forest management in Hutan Panjang Village has not yet reflected an equitable collaborative governance arrangement between the government and the Akit Indigenous Community. The indigenous community continues to face challenges due to limited participation in decision-making processes and declining access to the mangrove resources upon which their livelihoods have traditionally depended.

Keywords: Collaborative Governance, Mangrove Forest, Akit Indigenous Community, Government.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2026
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



TATA KELOLA KOLABORASI PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE
(Studi Kasus Suku Akit Pesisir Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert
Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)

HADI CANDRA
I3503231023

Tesis
 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
 Magister Sains pada
 Program Studi Sosiologi Pedesaan

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI PEDESAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tim Penguji Pada Ujian Tesis :
1. Dr. Ivanovich Agusta, S.Pt., M.Si



**Judul Tesis : TATA KELOLA KOLABORASI PENGELOLAAN HUTAN
MANGROVE (Studi Kasus Suku Akit Pesisir Desa Hutan
Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)**

Nama : Hadi Candra
NIM : I3503231023

Disetujui oleh

**Pembimbing 1 :
Dr.rer. nat. Rina Mardiana, SP.M.Si**



**Pembimbing 2 :
Dr. Nurmala Katrina Pandjaitan, MS. DEA**



Diketahui oleh

**Ketua Program Studi Sosiologi Pedesaan :
Dr. Ivanovich Agusta, S.Pt., M.Si
NIP. 19700816 199702 1 001**



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia :
Prof. Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si.
NIP. 197810032 00912 1 003**



Tanggal Ujian : 09 Juli 2026

Tanggal Lulus : 27 JUL 2026

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan dengan judul “Tata Kelola Kolaborasi Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Kasus Suku Akit Pesisir Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau).

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari kontribusi dan dukungan seluruh pihak yang terlibat dan pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr.rer.nat. Rina Mardiana, SP. M.Si dan Ibu Dr. Nurmala Katrina Pandjaitan, MS. DEA sebagai dosen pembimbing yang senantiasa dengan sabar memberikan masukan, saran dan kritik secara konstruktif selama proses penulisan tesis ini;
2. Bapak Surya Indra dan Ibu Asnah selaku orang tua yang selalu mendukung baik dari segi finansial serta material dan selalu memberikan dukungan-dukungan mental yang sangat berharga bagi penulis.
3. Semua teman-teman seperjuangan magister sosiologi pedesaan 2023 yang senantiasa saling mendukung dan menyemangati selama perkuliahan.

Bogor, Juli 2026



Hadi Candra
NIM.I3503231023

DAFTAR ISI

SUMMARY	IV
PRAKATA	X
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR	XIV
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penelitian Terdahulu (<i>State Of The Art</i>)	5
2.2 Konsep Kolaborasi	7
2.3 Kepemilikan Sumberdaya Alam	18
2.4 Hutan Mangrove	21
2.5 Kearifan Lokal	21
2.6 Suku Akit	22
2.7 Kerangka Pemikiran	23
III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan Penelitian	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.3 Sumber Data Penelitian	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Teknik Analisis Data	30
IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
4.1 Sejarah dan Kondisi Geografis	32
4.2 Kondisi Sosial	36
4.3 Kondisi Ekonomi	38
V HASIL DAN PEMBAHASAN	41
5.1 Peran Aktor dalam Penerapan <i>Collaborative Governance</i> Pengelolaan Hutan Mangrove	41
5.2 Proses dan Tindakan Kolaboratif (<i>Collaborative Actions</i>)	58
5.3 <i>Output Collaborative Actions</i> Aktor dalam Pengelolaan Hutan Mangrove	79



5.4 Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Pelestarian Ekosistem	
Hutan Mangrove.....	80
5.5 Adaptasi Masyarakat Adat Suku Akit Pesisir terhadap	
Perubahan Lingkungan, Sosial, dan Kebijakan	84
VI KESIMPULAN DAN SARAN	88
6.1 Kesimpulan.....	88
6.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	68

